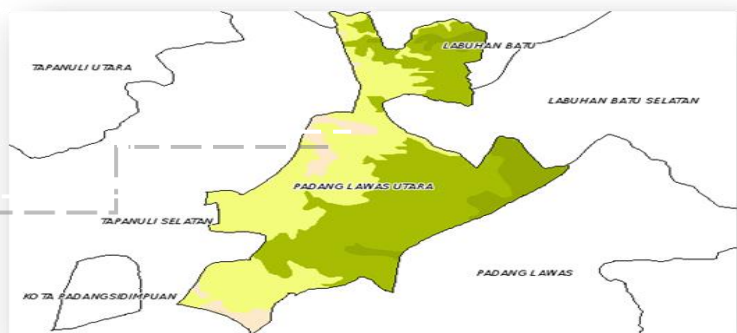




PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan Waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan Perubahan Renja disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan seluruh kepentingan OPD. Perubahan Renja bertujuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, agar pelaksanaannya sesuai dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Rancangan Perubahan Renja merupakan suatu proses secara Rancangan sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rancangan Perubahan Renja Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Disadari bahan penyusunan Rancangan Perubahan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan pendapat yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya pada tahun mendatang.

Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Gunungtua, 28 Juli 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



YUSUF M.D HASIBUAN, MAP
NIP. 19770914 199703 1 001

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN.....	
	1.1 Latar Belakang.....	4
	1.2 Landasan Hukum.....	5
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan II	10
BAB III.	TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
	3.2 Tujuan dan Sasaran dan Renja Perangkat Daerah	23
	3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV.	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja OPD adalah dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan bagian dan Tahapan yang dilakukan sehingga menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Dalam Prosesnya, Rencana kerja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan perubahan rencana kerja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan menyusun rancangan perubahan RKPD, dengan Fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Pencapaian Renstra OPD

Pada akhirnya perubahan rencana kerja OPD inilah yang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan perubahan renja dan Perubahan APBD Sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Program- Program yang tertuang dalam Perubahan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bantu dengan Kerjasama dengan berbagai pihak. Proses Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025

1.1 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025, maka landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang system Informasi Pembangunan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi,Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16); Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;

11. Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 1016 Tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara 2024- 2026
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tentang Perubanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabuparen Padng Lawas Utara Tahun 2025
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan maksud sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang menyangkut bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama satu tahun berjalan dengan tujuan agar Program Kegiatan dapat terencana, terarah dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Maksud dari disusunnya suatu Rencana kerja adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Mastarakat dan Desa
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip
- Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD

- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pilihan opd;
- Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat;

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- Untuk menyeragamkan langkah Perencanaan Pembangunan yang akan dilakukan di Daerah yang didasarkan pada perencanaan pusat, propinsi dan daerah terkait dengan Tupoksi OPD yang di emban.
- Memberikan arah,tujuan,sasaran strategis kebijakan,Program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tersedianya arah kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Sebagai Dokumen dasar bagi OPD terhadap tindakan Pengawasan dan sekaligus alat Monitor dan Evaluasi yangndilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Negara dan Daerah terhadap Perencanaan Kegiatan dan Program serta Implementasinya di Masyarakat.
- Sebagai bahan dasar bagi OPD untuk menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan di masyarakat dan sebagai bahan masukan untuk OPD dalam menyempurnakan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 4 (Empat) Bab dan memuat beberapa Sub Bab antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai Triwulan II

Pelaksanaan Evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Rekapitulasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel 2.1

TABEL 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten /kota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2024		Target Kinerja dan Anggaran n RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2024 s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Peran gkat Daerah Penanggu ng Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11	12	13		14 =7+13		1500,00%		16			
		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA																							
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																							
1	Menin gkatny a Pemer ataan Kesej ahtera an Masya rakat	2.13.01	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	626.519.615	779	3.287.587.124	180	764.519.216	212	899.700.948	-	-	-	-	392	1.664.220.164	1.205	2.290.739.779	30,56 %	119,00%	DINAS PEMB ERDAYAAN MASY ARAK AT DAN DESA	

1, 1		2.13.0 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1	22.80 0.000	1 3	33.09 8.400	3	3.830. 000	3	17.610.00 0	-	-	-	-	6	21.440. 000	18	44.240 .000	25,00 %	74,17%		
1. 1. 1		2.13.0 1.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 2	22.80 0.000	1 2	22.98 0.000	3	3.830. 000	3	7.660.000					6	11.490. 000	18	34.290 .000	50,00 %	50,00%		
1. 1. 1		2.13.0 1.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD					1	10.11 8.400				9.950.000					-	9.950.0 00	-	9.950. 000	0,00 %	98,34%		
1, 2		2.13.0 1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 6 6	248.7 31.95 5	1 2 7	214.5 83.20 0	2 0	34.10 0.700	5 0	100.937.6 00	-	-	-	-	7 0	135.038 .300	23 6	383.77 0.255	58,33 %	333,12%		

1. 2. 1		2.13.0 1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pen- erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n			4 0	3.116 .000	1	5.067 .200		1.268. 000		998.000				-	2.266.0 00	40	5.382. 000	0,00 %	44,72%		
1. 2. 2		2.13.0 1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap- an Kantor yang Disediaka n			1	36.73 9.200	1	38.28 3.700		8.985. 500		9.664.500				-	18.650. 000	1	55.389 .200	0,00 %	48,72%		
1. 2. 3		2.13.0 1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n			1	7.718 .000	1	8.746 .900		1.928. 400		1.867.900				-	3.796.3 00	1	11.514 .300	0,00 %	43,40%		
1. 2. 4		2.13.0 1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n			2	17.03 0.000	2	17.27 0.800		2.392. 000		5.940.000				-	8.332.0 00	2	25.362 .000	0,00 %	48,24%		

1. 2. 5		2.13.0 1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediaka n			1	18.60 9.600	1	13.65 0.600			4.650.000					-	4.650.0 00	1	23.259 .600	0,00 %	34,06%			
1. 2. 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n			1	30.80 0.000	1	30.93 0.000			7.700.000					-	7.700.0 00	1	38.500 .000	0,00 %	24,89%			
1. 2. 7			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 2 0	134.7 19.15 5	1 2 0	100.6 34.00 0	2 0	19.52 6.800	5 0	70.117.20 0				7 0	89.644. 000	19 0	224.36 3.155	58,33 %	89,08%			
1, 3		2.13.0 1.5	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentas e Terlaksan anya Pemelihar aan Barang Milik			1 6	82.01 8.189	1 3	37.51 0.000	3	6.742. 500	3	10.805.00 0	-	-	-	-	6	17.547. 500	22	99.565 .689	25,00 %	44,23%		

				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
1.3.1		2.13.01.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4	74.758.189	1	25.000.000		4.000.000		8.975.000					-	12.975.000	4	87.733.189	0,00%	51,90%		
1.3.2		2.13.01.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12	7.260.000	12	12.510.000	3	2.742.500	3	1.830.000					6	4.572.500	18	11.832.500	50,00%	36,55%		
1,4		2.13.01.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			618	270.807.271	624	2.983.209.624	154	719.846.016	156	760.291.348	-	-	-	-	310	1.480.137.364	928	1.750.944.635	44,44%	45,15%		

				Kabupaten/Kota																						
1.4.1		2.13.0 1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			600	9.000.000	600	6.000.000	150	1.500.000	150	1.500.000					300	3.000.000	900	12.000.000	50,00%	50,00%		
1.4.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	68.918.671	12	66.120.000	2	8.024.304	3	15.464.728					5	23.489.032	17	92.407.703	41,67%	35,52%		
1.4.3		2.13.0 1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6	192.888.600	12	2.911.089.624	2	710.321.712	3	743.326.620					5	1.453.648.332	11	1.646.536.932	41,67%	49,93%		
1,5		2.13.0 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			1	2.162.200	2	19.185.900	-	-	-	10.057.000	-	-	-	-	-	10.057.000	1	12.219.200	0,00%	98,35%		

			Perangkat Daerah																					
1.5.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	2.162.200	1	8.959.800							-	-	1	2.162.200	0,00 %	0,00%		
1.5.1			Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja Realisasi Kineerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan capaian Kinerja Realisasi Kineerja SKPD					1	10.226.100				10.057.000			-	10.057.000	-	10.057.000	0,00 %	98,35%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																		30,56%						
Predikat Kinerja																								
2	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-			-	59.640.000	1	25.611.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.640.000	0,00 %	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2,1		2.13.03.1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kegiatan kerjasama antar desa			1	59.640.000	1	25.611.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.640.000	0,00 %	0,00%		

2.1.1		2.13.03.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupate n/Kota			1	59.640.000	1	25.611.600									-	-	1	59.640.000	0,00 %	0,00%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																				0,00%						
Predikat Kinerja																										
3	Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-			-	303.697.700	1	25.586.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	303.697.700	0,00 %	0,00%	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
3,1		2.13.04.1	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			1	303.697.700	1	25.586.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	303.697.700	0,00 %	0,00%		

3.1.3			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			1	303.697.700	1	25.586.200								-	-	1	303.697.700	0,00 %	0,00%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																			0,00%						
Predikat Kinerja																									
4	Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-			-	1.935.804.200	1.299.726.100	-	77.170.000	-	491.762.320	-	-	-	-	-	568.932.320	387	2.504.736.520	0,00 %	44,66%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
4,1		2.13.05.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan			387	1.935.804.200	1.299.726.100	-	77.170.000	-	491.762.320	-	-	-	-	-	568.932.320	387	2.504.736.520	0,00 %	44,66%		

			Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota																					
4.1.1			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat			386	1.876.062.300	386	1.273.999.600		77.170.000		491.762.320					-	568.932.320	386	2.444.994.620	0,00 %	44,66%	

[illegible]

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DEARAH

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaituketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Kebijakan Nasional tertuang didalam RPD dan juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah. dengan prioritas yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik

Dibawah ini yang menjadi indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara:

**Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun**

No	IKU	Target
1	4	5
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	68,92
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00
	Indeks Desa Mambangun (IDM)	Desa Maju 15, Berkembang 150, Tertinggal 174

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun) yang selanjutnya akan menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah selama satu tahun yang terakumulasi dalam 3 tahun renstra. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Renja Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra dan RPD dirumuskan sebagai berikut

TUJUAN : “Mewujudkan Pemeritahan yang baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”

SASARAN: “ Meningkatkan Tata Kelola yang baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan
daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5		
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di bidang Perberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akip Perangkat Daerah	63,92	68,92	73,92
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.00	80.00	82,00
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa Maju 10, Berkembang 125, tertinggal 184	Desa Maju 15, Berkembang 150, tertinggal 174	Desa Maju 20, Berkembang 125, tertinggal 162

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Setiap program pada dasarnya menyebar ke seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, karena sasaran program adalah seluruh masyarakat, lembaga masyarakat perdesaan dan pemerintahan desa, Namun ada program yang bersifat spesifik diarahkan dengan pertimbangan kawasan seperti kegiatan perlombaan desa/ kelurahan dan pengembangan teknologi tepat guna, dimana kegiatan tersebut diarahkan pada kawasan yang mempunyai keunggulan tertentu. Disamping itu ada pula kegiatan yang diarahkan pada kelompok masyarakat tertentu diantaranya kegiatan pembinaan

kelompok usaha ekonomi desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa serta peningkatan peran perempuan dipedesaan. Kebutuhan dana kegiatan secara total sangat bervariasi setiap tahunnya oleh karenanya prioritas kegiatan menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana program /kegiatan/ sub kegiatan setiap tahunnya. Selanjutnya program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dirumuskan disesuaikan dengan usulan hasil musrenbang yang dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah daerah serta program yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	UR USA N / BID AN G UR USA N / PR OG RA M / KE GIA TAN / SUB KE GIA TAN	INDIKAT OR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	T A R G E T A K H I R P E R I O D E R E N S T R A O P D	RE ALI SA SI CA PAI AN RE NJ A OP D TA HU N 202 3	PR AK IR AA N CA PAI AN TA RG ET RE NJ A OP D TA HU N 202 4	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE LOMPO K SASAR AN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TAR GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bert amba h/Berk urang (10- 12)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TA RGE T	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SE BE LU M	SES UD AH	KPD 2025	R APBD	RKPD PERUBA HAN 2025				N ASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							7.580.15 3.313,00	7.493.425.2 54,00	7.409.215. 165,00	- 170.93 8.148, 00							8.580.99 6.976,00		

	2	UR USA N PE ME RIN TAH AN WA JIB YAN G TID AK BER KAI TAN DEN GA N PEL AYA NA N DAS AR						7.580.15 3.313,00	7.493.425.2 54,00	7.409.215. 165,00	- 170.93 8.148, 00							8.580.99 6.976,00	
	2.13	UR USA N PE ME RIN TAH AN BID AN G PE MB ERD AYA AN MA SYA						7.580.15 3.313,00	7.493.425.2 54,00	7.409.215. 165,00	- 170.93 8.148, 00							8.580.99 6.976,00	

		RA KAT DA N DES A																		
1,	2.13.01	PR OG RA M PEN UNJ AN G UR USA N PE ME RIN TAH AN DAE RA H KA BUP ATE N/K OTA	-				-	-	6.126.13 8.813,00	6.039.410.7 54,00	5.950.088. 465,00	328.25 6.363, 00							6.454.39 5.176,00	
	2.13.01.2. 01	Pere nca naa n, Pen gan ggar an, dan Eval uasi Kine rja	-				-	-	19.185.9 00,00	19.185.900, 00	25.705.50 0,00	6.519. 600,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD		12.654.0 00,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

		Pera ngk at Dae rah													ekonomi dan pember antasan kemiski nan.					
	2.13.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dok umen	1 Dok umen	8.959.80 0,00	8.959.800,0 0	15.479.40 0,00	6.519. 600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.154.00 0,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>				5 Lap oran	5 Lap oran	10.226.1 00,00	10.226.100, 00	10.226.10 0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.500.0 00,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												aan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Laporan kegiatan administrasi keuangan daerah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				132 orang/TA 23 Orang 2 Laporan	132 orang/TA 23 Orang 2 Laporan	5.367.072.413,00	2.562.143.330,00	2.494.403.341,00	- 2.872.669.072,00			Memban dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD		5.619.008.376,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	5.202.394.013,00	2.397.464.930,00	2.461.304.941,00	- 2.741.089.072,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.451.428.376,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	154.560.000,00	154.560.000,00	22.980.000,00	- 131.580.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			157.080.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				4 Laporan	1 Laporan	10.118.400,00	10.118.400,00	10.118.400,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.500.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Adm inistr asi Umu m Pera ngk at Dae rah	<i>Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	357.111.900,00	357.111.900,00	318.010.000,00	- 39.101.900,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD		401.302.800,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang</i>				40 Paket	40 Paket	5.067.200,00	5.067.200,00	7.052.300,00	1.985.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.116.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

			<i>Disediaka n</i>																	
	2.13.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n</i>				1 Pak et	1 Pak et	55.196.2 00,00	55.196.200, 00	139.725.4 00,00	84.529 .200,0 0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			58.379.9 00,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n</i>				1 Pak et	1 Pak et	8.746.90 0,00	8.746.900,0 0	8.746.900, 00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			7.788.10 0,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n</i>				2 Pak et	2 Pak et	17.270.8 00,00	17.270.800, 00	17.270.80 0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			17.270.8 00,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.098.800,00	2.098.800,00	13.650.600,00	11.551.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			18.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.930.000,00	30.930.000,00	30.930.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	237.802.000,00	237.802.000,00	100.634.000,00	- 137.168.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			265.188.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>				3 Laporan	3 Laporan	289.008.600,00	3.007.209.624,00	2.988.969.624,00	2.699.961.024,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD		280.920.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	90.120.000,00	90.120.000,00	71.880.000,00	-18.240.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			58.920.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	192.888.600,00	2.911.089.624,00	2.911.089.624,00	2.718.201.024,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			216.000.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				2 Laporan	2 Laporan	93.760.00,00	93.760.000,00	123.000.00,00	29.240.000,00			Memban- gun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD		140.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	81.250.00,00	81.250.000,00	75.000.00,00	- 6.250.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memban- gun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			78.190.00,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	12.510.000,00	12.510.000,00	18.000.000,00	5.490.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			7.320.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi				-	2 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
2,	2.13.03	PR OG RA	Persentas e Peningkat				100 per sen	100 pers en	60.000.000,00	60.000.000,00	25.611.600,00	- 60.000							0,00	

		M P E N I N G K A T A N K E R J A S A M A D E S A	an Kerjasama Desa									.000,0 0								
	2.13.03.2. 01	Fasil itasi Kerj a Sam a anta r Des a	Jumlah Dokumen Kerjasama antar desa				1 Dok um en	1 Dok ume n	60.000.0 00,00	60.000.000, 00	25.611.60 0,00	- 34.388 .400,0 0			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA		0,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.03.2. 01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam				1 Dok um en	1 Dok ume n	60.000.0 00,00	60.000.000, 00	25.611.60 0,00	- 34.388 .400,0 0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi ,	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

			Kabupaten/Kota												pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					
3,	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa				100 Persen	100 Persen	60.014.600,00	60.014.600,00	25.586.200,00	6.587.200,00							66.601.800,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa				1 Dokumen	1 Dokumen	60.014.600,00	60.014.600,00	25.586.200,00	- 34.428.400,00			Mem bangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA		66.601.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		Desa																		
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	40 Orang	60.014.600,00	60.014.600,00	25.586.200,00	- 34.428.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			6.600.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.001.800,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

															aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.						
4,	2.13.05	PR OG RA M PE MB ERD AYA AN LEM BA GA KE MA SYA RA KAT AN, LEM BA GA AD AT DA N MA SYA RA KAT HU KU M AD AT	Persentas e Pemberd ayaan Lembaga Kemasyar akatan				100 per sen	100 pers en	1.333.99 9.900,00	1.333.999.9 00,00	1.407.928. 900,00	726.00 0.100, 00								2.060.00 0.000,00	

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.333.999.900,00	1.333.999.900,00	1.407.928.900,00	73.929.000,00			Memangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA		2.060.000.000,00	DINAS PEMERINTAH RAYAN MASYARAKAT DAN DESA
--	--------------	---	---	--	--	--	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------	---------------	--	--	--	---	------	--	------------------	--

		yara kat Huk um Adat yan g Mas yara kat Pela kuny a Huk um Adat yan g Sam a dala m Dae rah Kab upat en/K ota																		
	2.13.05.2. 01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
		Jumlah Lembaga Kemasyar akatan Desa/Kelu rahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat				386 Le mb aga	386 Lem bag a	1.273.99 9.600,00	1.273.999.6 00,00	1.382.202. 400,00	108.20 2.800, 00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG PENDIDI KAN	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.000.00 0.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA	

			Desa/Kelu rahan dan Masyarak at Hukum Adat yang Ditingkatk an Kapasitas nya												ekonomi dan pember antasan kemiski nan.					
	2.13.05.2. 01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerinta h Desa dalam Pemanfaa tan Teknologi Tepat Guna				1 Lap ora n	1 Lap oran	60.000.3 00,00	60.000.300, 00	25.726.50 0,00	- 34.273 .800,0 0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.0 00,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA
	2.13.05.2. 01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggera k PKK dalam Penyeleng garaan				1 Dok um en	0 Dok ume n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.000.00 0.000,00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA

			Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											, pemerataan ekonomi dan pemberian kemitraan.						
	J U M L A H								7.580.153.313,00	7.493.425.254,00	7.409.215.165,00	177.088.576.008,00							8.580.996.976,00	

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hal terkait dengan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta diupayakan dapat meningkat setiap tahun mengingat sasaran program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat kompleks baik jenis maupun jumlahnya. Jika kondisi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan program, maka dalam penyusunan program akan ditetapkan skala prioritas kegiatan yang sangat mendesak dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

2. Untuk kelancaran kegiatan, dalam perumusan kegiatan selalu memperhatikan usulan kegiatan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan melalui forum musrenbang, juga memperhatikan petunjuk- petunjuk teknis pada setiap program/kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3. Rencana tindak lanjut dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

a. Evaluasi terhadap keseluruhan program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi untuk program/kegiatan selanjutnya.

b. Secara berkelanjutan melaksanakan bimbingan teknis bagi staf yang melaksanakan kegiatan teknis mengingat program dan kegiatan senantiasa ada perubahan

Demikian Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Permendagri Nomor 90 tahun 2019

Gunung Tua, 28 JULI 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**YUSUF MD, HASIBUAN, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP.19770914 199703 1 001**

